

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan sebuah negara, bahkan dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu negara itu mampu secara finansial dan sejahtera. Keberhasilan suatu negara tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pada kondisi ini, pertumbuhan ditandai dengan masuknya dana kedalam sistem ekonomi.

Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti penting pembentukan modal (*capital formation*) sebagai salah satu penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal merupakan salah satu bentuk investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2002).

Usaha penanaman modal untuk pembangunan dapat dibedakan menjadi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Modal yang berasal dari dalam negeri salah satunya berasal dari tabungan masyarakat, yang

dimaksud dengan tabungan masyarakat adalah bagian pendapatan yang diterima masyarakat yang secara sukarela tidak digunakan untuk konsumsi (Sukirno, 2006).

Dalam teori Rostow menjelaskan bahwa ada tahap-tahap yang dilewati suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. Teori ini diperjelas lagi dengan teori Harrod-Domar yang menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDB yang ditabung akan menambah *capital stock* sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam Mankiw (2006),

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya. Tabungan juga sering diartikan sebagai pendapatan suatu masyarakat yang tidak dikonsumsi dan hanya disimpan sebagai cadangan yang digunakan untuk berjaga-jaga di masa yang akan datang.

Tabungan merupakan faktor penting untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan oleh teori studi pembangunan yaitu model pertumbuhan Solow (*Solow growth model*), menjelaskan bahwa tabungan dan investasi merupakan aspek penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam Mankiw (2006), Model Solow menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah indikator yang penting dalam persediaan modal pada kondisi mapan. Jika tingkat tabungan tinggi maka perekonomian akan memiliki persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi, sebaliknya jika

tingkat tabungan rendah maka perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang rendah sehingga akan memperlamban pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara.

Salah satu permasalahan di negara berkembang adalah keterbatasan dalam pengumpulan dana untuk investasi, karena diperlukan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan negaranya. Negara-negara sedang berkembang membiayai investasi dengan cara mengintensifkan usaha-usaha mobilisasi tabungan dari berbagai sumber, baik tabungan domestik maupun tabungan asing/luar negeri. Di tengah serangkaian pemikiran dan perdebatan tentang penolakan ketergantungan terhadap luar negeri, maka sumber pembiayaan domestik yang berasal dari tabungan pemerintah dan tabungan swasta/masyarakat domestik menjadi isu yang menarik. Sumber-sumber domestik memang relatif lebih aman terhadap fluktuasi perekonomian global, dibandingkan dengan sumber luar negeri.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang juga mengalami hal tersebut, padahal kegiatan investasi mutlak diperlukan, sebab pada dasarnya produksi dan GDP hanya dapat ditingkatkan dengan lebih banyak menggunakan investasi, yaitu jumlah tabungan yang ada dalam masyarakat. Di Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional yang mencakup investasi domestik, sumber dananya dapat bersumber dari tabungan nasional dan pinjaman luar negeri. Namun karena terbatasnya sumber dana serta pinjaman yang diperoleh dari luar negeri, maka diperlukan tabungan nasional yang lebih tinggi sebagai sumber dana yang utama.

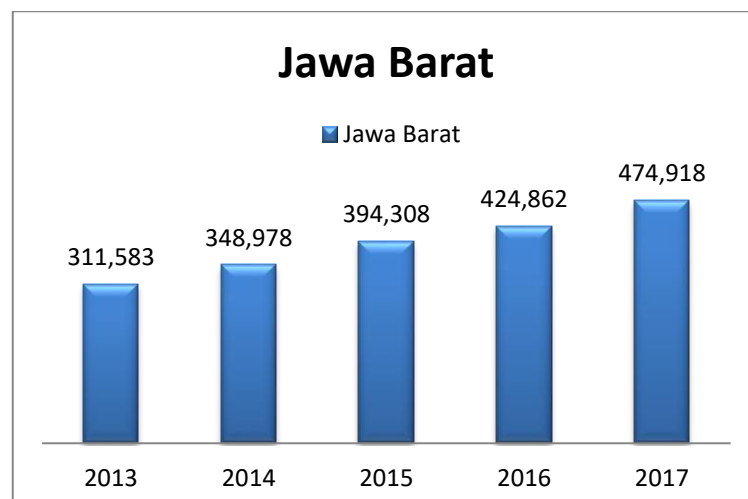
Tabel 1.1
Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valas
pada Bank Umum dan BPR menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017

No	Provinsi	Jumlah Simpanan (Miliar Rp)	Kontribusi (%)
1	D.K.I. Jakarta	2.473.623	48,10
2	Jawa Timur	502.607	9,77
3	Jawa Barat	474.918	9,23
4	Jawa Tengah	280.305	5,45
5	Sumatera Utara	217.103	4,22
6	Banten	177.618	3,45
7	Bali	91.770	1,78
8	Sulawesi Selatan	88.375	1,72
9	Kalimantan Timur	77.233	1,50
10	Riau	73.212	1,42
11	Sumatera Selatan	71.192	1,38
12	D.I. Yogyakarta	59.361	1,15
13	Kalimantan Barat	52.621	1,02
14	Kalimantan Selatan	51.724	1,01
15	Kepulauan Riau	44.805	0,87
16	Lampung	43.652	0,85
17	Sumatera Barat	39.559	0,77
18	Papua	38.441	0,75
19	Nanggroe Aceh Darussalam	37.450	0,73
19	Jambi	30.225	0,59
20	Nusa Tenggara Barat	25.901	0,50
21	Nusa Tenggara Timur	23.889	0,46
22	Sulawesi Utara	23.367	0,45
23	Kalimantan Tengah	22.633	0,44
24	Sulawesi Tengah	19.606	0,38
25	Bangka Belitung	18.691	0,36
26	Sulawesi Tenggara	16.822	0,33
27	Papua Barat	14.996	0,29
28	Maluku	12.797	0,25
29	Bengkulu	12.143	0,24
30	Kalimantan Utara	10.319	0,20
31	Maluku Utara	6.967	0,14
32	Gorontalo	4.571	0,09
33	Sulawesi Barat	4.494	0,09
34	Jumlah	5.142.991	100

Sumber : Bank Indonesia 2017

Dari data tabel 1.1 menjelaskan jumlah simpanan masyarakat di Indonesia periode tahun 2017 dengan berbagai provinsi di Indonesia. Jumlah simpanan terbanyak tahun 2017 terdapat di D.K.I Jakarta dengan nilai yang cukup besar dibandingkan provinsi lainnya yaitu sebesar Rp 2.473.623,- M dengan berkontribusi sebanyak 48,10% terhadap jumlah simpanan di Indonesia, dan untuk simpanan terendah tahun 2017 terdapat pada provinsi Sulawesi barat yang hanya mencapai Rp 4.494.- M dan berkontribusi 0,09% terhadap jumlah simpanan di Indonesia, sedangkan untuk jumlah seluruh simpanan di Indonesia tahun 2017 mencapai Rp 5.142.991,- M.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki jumlah simpanan cukup tinggi. Berdasarkan tabel 1.1 Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ketiga setelah Jawa Timur dengan jumlah simpanan masyarakat tahun 2017 mencapai Rp 474.918,- M dengan kontribusi sebesar 9,23% terhadap jumlah simpanan di Indonesia.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat dalam Angka 2018

Gambar 1.1
Perkembangan Tabungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2017 (Miliar Rp)

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki perkembangan tabungan dengan peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.1 yang menunjukkan perkembangan dengan trend tabungan yang meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan tingkat jumlah tabungan masyarakat yang terus meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Barat mempunyai potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan perekonomian di Indonesia.

Perekonomian masyarakat dapat dikatakan berjalan stabil apabila pendapatan yang diperoleh masyarakat mengalami peningkatan atau minimal berada pada kondisi yang stabil. Dari besarnya pendapatan yang diperoleh tersebut, hendaknya masyarakat dapat menyisihkan dari sebagian pendapatannya untuk ditabung. Tabungan masyarakat merupakan salah satu sumber investasi yang dapat digunakan untuk menjalankan pembangunan ekonomi. Semakin besar tingkat tabungan masyarakat, maka semakin besar pula kesempatan untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor.

Tabel 1.2
Perbandingan Data Tabungan, PDRB Berdasarkan Harga Berlaku, dan
PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun
2010-2017

No	Kab/kota	Jumlah Tabungan (Juta Rp)	PDRB (Miliar Rp)	PDRB Perkapita (Juta/Org/th)
	Kabupaten/Regency			
1	Bekasi	42.871.797	282.468,81	80,70
2	Bogor	21.169.366	201.368,68	35,24
3	Bandung	18.698.352	103.362,82	28,26
4	Karawang	18.161.749	197.057,31	85,07
5	Cirebon	6.497.911	41.947,73	19,42
6	Purwakarta	6.451.800	58.522,23	62,04

No	Kab/kota	Jumlah Tabungan (Juta Rp)	PDRB (Miliar Rp)	PDRB Perkapita (Juta/Org/th)
7	Cianjur	6.415.095	38.550,12	17,08
8	Indramayu	5.500.195	69.824,01	40,83
9	Garut	5.365.160	47.992,86	18,54
10	Subang	4.925.982	34.167,00	21,87
11	Ciamis	4.185.162	26.544,48	22,46
12	Sumedang	4.117.865	29.638,76	25,85
13	Kuningan	3.993.490	20.447,24	19,14
14	Sukabumi	3.684.764	55.255,90	22,52
15	Majalengka	3.428.302	25.419,28	21,29
16	Tasikmalaya	2.962.596	30.522,29	17,47
17	Bandung Barat	1.493.720	40.222,50	24,14
18	Pangandaran	19.302	9.400,88	23,79
Kota/City				
19	Bandung	155.179.615	240.109,63	96,12
20	Bekasi	52.528.940	83.327,64	29,14
21	Bogor	34.123.276	38.506,47	35,62
22	Depok	33.581.428	58.344,49	25,88
23	Cimahi	11.979.240	26.533,62	44,14
24	Cirebon	10.742.564	19.739,68	63,00
25	Tasikmalaya	9.382.277	18.317,99	27,70
26	Sukabumi	6.813.939	10.555,67	32,60
27	Banjar	648.181	3.908,90	21,43
Jawa Barat		474.918.069	1.812.075,00	37,72

Sumber : Badan Pusat Statistik, Jawa Barat dalam Angka 2018

Berdasarkan tabel 1.2, jumlah tabungan tertinggi di Provinsi Jawa Barat terdapat di Kabupaten Bekasi dengan jumlah sebesar Rp 42.871.797,- juta, dan Kota Bandung dengan jumlah sebesar Rp 155.179.615,- juta, serta untuk tingkat PDRB tahun 2017 berdasarkan harga berlaku dengan jumlah tertinggi sama dengan data tabungan tertinggi yaitu terdapat di Kabupaten Bekasi dengan jumlah sebesar Rp 282.468,81,- juta dan Kota Bandung dengan jumlah sebesar Rp 240.109,63 -. juta.

Pada tabel 1.2, terdapat perbandingan antara jumlah tabungan, PDRB berdasarkan harga berlaku, serta PDRB per kapita di setiap Kab/Kota Provinsi Jawa Barat. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan perkapita suatu daerah dapat diketahui melalui PDRB. PDRB mengukur perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu daerah dari segi struktur ekonomi maupun hubungan antara komponen-komponennya. PDRB dan pendapatan masyarakat berbanding lurus. Artinya, jika PDRB meningkat maka pendapatan juga meningkat, dan semakin besar pendapatan maka akan meningkatkan jumlah tabungan. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin baik bagi perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Pada tahun 2017 PDRB per kapita atas harga berlaku Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 37,72 juta. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya tabel 1.2 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jumlah tabungan dengan PDRB, serta PDRB per kapita

Selain PDRB perkapita, adanya kenaikan ataupun penurunan tingkat inflasi juga memegang peran penting dalam mempengaruhi perilaku masyarakat untuk menabung. Inflasi diartikan sebagai suatu keadaan dimana harga-harga meningkat secara umum dan terus menerus dalam periode tertentu. Semakin tinggi tingkat inflasi maka akan menyebabkan pengeluaran konsumsi masyarakat yang meningkat karena adanya kenaikan harga. Dengan meningkatnya pengeluaran konsumsi maka jumlah tabungan masyarakat akan menurun karena pendapatan masyarakat lebih besar dikeluarkan untuk konsumsi.

Disamping adanya tingkat inflasi yang terjadi, suku bunga menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan tinggi atau rendahnya jumlah tabungan masyarakat. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi masyarakat untuk dapat meningkatkan tabungan. Hal ini dapat diamati pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang selalu mencari informasi mengenai tingkat suku bunga yang tercipta didalam pasar uang. Dengan tingkat suku bunga yang tinggi masyarakat akan lebih mengurangi pengeluarannya untuk konsumsi guna menambah tabungan mereka, karena masyarakat mempunyai harapan bahwa uang mereka akan bertambah pada bulan atau tahun berikutnya dari pada mereka harus menyimpan uang dirumah. Dan sebaliknya apabila tingkat suku bunga menurun maka masyarakat akan mengurangi tabungan.

Rasio ketergantungan penduduk di Provinsi Jawa Barat pun cukup tinggi, tercatat bahwa rasio ketergantungan di Jawa Barat di tahun 2017 masih mencapai angka 47,02% yang artinya dalam 100 orang usia produktif menanggung 47 orang usia nonproduktif. Nilai ini menunjukkan bahwa Jawa Barat telah memasuki periode bonus demografi dimana 1 orang usia nonproduktif ditanggung oleh setidaknya 2 orang usia produktif. Kelompok usia anak tidak produktif membutuhkan investasi dalam modal manusia baik melalui pendidikan formal maupun informal. Penduduk usia tua juga sudah tidak produktif dan mempunyai sedikit kontribusi, sedangkan kelompok usia menengah adalah kelompok yang paling produktif walaupun ada sebagian yang tidak produktif. Kelompok usia produktif cenderung menabung sehingga akan mempercepat tingkat tabungan. Dalam rasio ketergantungan yang tinggi penduduk yang bekerja relatif lebih

sedikit dan harus menanggung biaya sekolah anak-anak dan biaya kesehatan orang tua sehingga tingkat tabungan akan menurun.

Mengingat pentingnya tabungan masyarakat Provinsi Jawa Barat dalam berkontribusi untuk pembangunan perekonomian di Indonesia, maka menjadi sangat penting dan menarik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat . Hal-hal tersebut diatas menjadi alasan kuat dan dasar bagi peneliti untuk menguraikannya dalam penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Tabungan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pengaruh PDRB per kapita, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan rasio ketergantungan terhadap tingkat tabungan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017 baik masing-masing dari setiap variabel maupun secara bersama-sama ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaruh pengaruh PDRB per kapita, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan rasio ketergantungan terhadap tingkat tabungan masyarakat di

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017 baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis / Akademik

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa sumber informasi khususnya pada kajian ilmu ekonomi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu ekonomi.

1.4.2 Kegunaan Praktis / Empiris

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi lembaga keuangan bank maupun non bank tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Tabungan pada Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian di bidang kajian yang sama.
3. Dapat menjadi sumber informasi dan dijadikan bahan referensi serta bahan perbandingan yang berguna bagi pembaca, juga sebagai tambahan pengetahuan bagi yang memerlukannya, khususnya mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tabungan.